

## Bimbingan Teknis Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus untuk Guru-Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Hartini Nara<sup>1</sup>, Siti Nuraini Purnamawati<sup>2</sup>, Hana Sajidah<sup>3</sup>, Julia Jasmine<sup>4</sup>

### **Kata Kunci:**

Anak Berkebutuhan Khusus;  
Inklusif;  
SMK.

### **Keywords :**

Children with Special Needs;  
Inclusive;  
Vocational High School.

### **Correspondensi Author**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta  
Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT 11/RW 14, Pulo Gadung, Jakarta Timur  
Email: hartininaro08@gmail.com

### **Article History**

Received: 06-06-2025;  
Reviewed: 27-06-2025;  
Accepted: 16-08-2025;  
Available Online: 25-08-2025;  
Published: 27-08-2025.

**Abstract.** This technical guidance activity aims to provide understanding to teachers and educational staff to overcome the barriers they face, particularly concerning how to address and meet the learning needs of students with special needs in an inclusive learning environment. The methods used include technical guidance through material delivery and focus group discussion (FGD). The outputs from this activity include positive impacts and an expanded understanding of teachers and educational staff in inclusive vocational high schools in Pekalongan Regency in handling and educating students with special needs, poster, YouTube channel video, news article, as well as the establishment of a partnership between the Special Education Program of the Faculty of Education at Universitas Negeri Jakarta and the Education and Culture Department of Pekalongan Regency.

**Abstrak.** Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi guru dan tenaga kependidikan agar dapat mengatasi hambatan yang dihadapi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara menangani dan memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan belajar yang inklusif demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah bimbingan teknis berupa penyampaian materi dan *focus group discussion* (FGD). Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dampak positif dan memperluas pemahaman guru dan tenaga kependidikan SMK inklusif di Kabupaten Pekalongan dalam menangani dan mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, poster, video di kanal YouTube, artikel berita, serta terjalin kemitraan antara Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



## PENDAHULUAN

Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah proses untuk mengangkat derajat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Melalui pendidikan, hendaknya dapat terjadi peningkatan pengetahuan guna menciptakan manusia yang mampu berkontribusi dalam lingkungan masyarakat (Ramadhana & Meitasari, 2023). Pendekatan pendidikan yang diberikan kepada setiap manusia mengupayakan pemenuhan hak pada setiap individu. Hal ini yang menjadi realisasi lahirnya pendidikan inklusif yang memiliki tujuan terpenuhinya pendidikan bagi setiap individu dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda, namun dapat berdampingan dalam lingkungan belajar yang sama.

Prinsip utama dari inklusivitas adalah menyikapi keberagaman secara terbuka dan kritis, mengambil inisiatif untuk belajar, serta memanfaatkan beragam perspektif dan situasi dalam penerapannya (Rurit & Dewanto, 2021). Dalam lingkup pendidikan, penerapan inklusivitas berarti setiap peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya melalui akses pendidikan yang berkualitas (Alfikri et al., 2022). Pendidikan yang berkualitas, dalam hal ini, mencakup proses, sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing peserta didik.

Pendidikan inklusif hadir dalam rangka menciptakan kesetaraan bagi seluruh individu dalam memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana slogan "*Education for All*" oleh *World Declaration* yang diadakan di Jomtien, Thailand, pada tahun 1990. Deklarasi yang melibatkan delegasi dari 155 negara serta perwakilan dari 150 organisasi di dunia, mendeklarasikan kesetaraan pendidikan untuk seluruh anak, remaja, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, nomaden atau migran, individu dengan atau tanpa kebutuhan khusus, masyarakat adat, bahkan kelompok etnis, ras, dan minoritas (Socorro & Reyes, 2020). Pendidikan inklusif telah menjadi konsep global yang digunakan seluruh dunia untuk memberikan akses pendidikan yang setara kepada seluruh

peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus kecakapan sosial pada tiap-tiap individu bahkan di lingkungan yang beragam (Buchner et al., 2021). Peserta didik berkebutuhan khusus dijelaskan sebagai mereka yang memiliki kemampuan fisik, mental, maupun intelektual yang terbatas, sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas seperti anak pada umumnya dan memerlukan layanan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti aktivitas belajar, interaksi sosial, berkomunikasi, maupun mengurus diri sendiri (Nara et al., 2023). Dengan demikian, diketahui bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem yang menyediakan akses setara bagi semua individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan akademik dan sosial setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang mulai menerapkan kebijakan inklusif dalam *setting* pendidikan. Sejak tahun 2020, Kabupaten Pekalongan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di berbagai jenjang dan jalur pendidikan, yang mencakup penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta peningkatan kompetensi pendidik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal.

Pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan diterapkan pada seluruh jenjang, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu jenjang yang dapat dituju oleh peserta didik berkebutuhan

khusus untuk melanjutkan pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan pembelajaran yang mengutamakan kemampuan dan keterampilan yang bisa berguna di masyarakat, sehingga saat lulus dari sekolah, anak dapat menerapkan keterampilannya dalam kehidupan bermasyarakat (Rahayu et al., 2024). Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, SMK menjadi jenjang yang dapat dituju, dikarenakan pembelajaran di SMK didominasi oleh kegiatan praktik, dengan persentase sebesar 60%, sedangkan 40% sisanya dialokasikan untuk pembelajaran teori (Marbun & Prastawa, 2023). Hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan mengenai diikutsertakannya SMK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini mewajibkan sekolah reguler untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, sekolah wajib memastikan adanya dukungan finansial, sarana dan prasarana yang sesuai, serta penyesuaian kurikulum guna memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan yang berlaku.

Selain akomodasi yang layak, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif serta menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan di sekolah-sekolah, termasuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan khusus agar dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif (Alfikri et al., 2022). Meskipun demikian, pada praktiknya, guru dan tenaga kependidikan mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengajarkan anak berkebutuhan khusus di sekolah dengan *setting* inklusif.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, antara lain sulitnya membuat kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus, masih rendahnya pengetahuan guru terhadap kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, serta kurangnya guru pembantu atau guru pembimbing khusus untuk menyusun rencana pembelajaran individual (Kusmaryono, 2023). Berbagai tantangan ini menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi sekedar diterima di sekolah reguler yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, namun kebutuhan peserta didik tidak sepenuhnya terlayani dengan baik (Hartadi et al., 2019). Akibatnya, pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus menjadi kurang efektif dan hanya disamakan dengan peserta didik reguler.

Tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dialami oleh para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Pekalongan masih cukup kesulitan dalam mengelola pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dengan tepat. Sulitnya mendapatkan guru yang merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus yang bisa mengajar di sekolah inklusif menjadi kondisi yang dapat menghambat manajemen sekolah dalam mengelola peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, rendahnya pemahaman guru terhadap kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif juga dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Hal ini menjadi sorotan bahwa penerapan inklusivitas di sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih kurang efektif (Tyas Pratiwi et al., 2022).

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi di lapangan, terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan, antara lain rendahnya pemahaman guru terhadap kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, terbatasnya jumlah guru dan tenaga

kependidikan yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus, sehingga sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa menyediakan akomodasi dan program yang menunjang kebutuhan serta potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi, berupa bimbingan teknis bagi guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan tentang bagaimana cara menangani dan memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan belajar yang inklusif. Dengan demikian, diharapkan agar melalui kegiatan bimbingan teknis ini, guru dan tenaga kependidikan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dapat mengatasi hambatan yang dihadapi, demi terciptanya pembelajaran yang efektif bagi seluruh peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

## METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis, 1 Agustus 2024, bertempat di Gedung Sanggar Pramuka Kwartir Ranting II.26.08 Kajen, yang terletak di Jalan Ki Ageng Giring Nomor 79C, Watuhelah, Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Peserta yang hadir merupakan guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah ditunjuk sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Kabupaten Pekalongan.

Secara khusus, kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dialami oleh guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pekalongan berkenaan dengan kurang efektifnya proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah. Dalam penyelenggaraannya, metode yang digunakan berupa penyampaian materi, *focus group discussion* (FGD), dan diskusi. *Focus group discussion* (FGD) merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan perundingan kelompok yang dipandu oleh

seorang moderator dengan tujuan menggali pandangan, perasaan, dan pengalaman partisipan mengenai suatu topik tertentu (TÜMEN AKYILDIZ & AHMED, 2021). Metode ini mengutamakan interaksi antar peserta untuk menggali berbagai pandangan dan pengalaman mengenai topik yang dibahas, sehingga menghasilkan beragam perspektif secara efektif dalam waktu singkat melalui diskusi yang dipicu oleh pertanyaan terbuka.

Selain FGD, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non-partisipatif selama kegiatan untuk mencermati keterlibatan peserta, dinamika kelompok, serta respons terhadap materi yang disampaikan. Observasi non-partisipatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang alami dan kontekstual tanpa mengganggu proses kegiatan, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku peserta dalam situasi nyata (Eldh et al., 2020). Kombinasi antara FGD dan observasi digunakan untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam kegiatan ini, pembicara atau narasumber merupakan dosen program studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Adapun langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus bagi guru-guru SMK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap pertama adalah tahap persiapan, yakni tim PKM melakukan survei dan analisis situasi terlebih dahulu di lokasi dan daerah kegiatan. Tim PKM mengurus perizinan dan implementasi kerja sama kepada dinas pendidikan setempat untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis sebagai bagian dari wilayah binaan fakultas.

### 2. Tahap Pelaksanaan

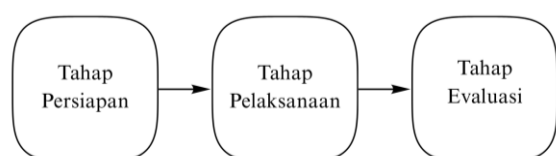
Pelaksanaan bimbingan teknis pembelajaran anak berkebutuhan khusus bagi guru-guru SMK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan ini dilaksanakan di Gedung Sanggar Pramuka Kwartir Ranting II.26.08 Kajen, dengan pembawa acara dari pihak guru, sedangkan moderator dari tim

PKM.

### 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi non-partisipatif untuk menggali pengalaman, respons, dan efektivitas kegiatan. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan dampak program terhadap peningkatan kapasitas guru.

Secara sederhana, tahapan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1:** Tahapan Pelaksanaan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis kepada guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) pertemuan dengan agenda berupa pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk membahas masalah serta tantangan yang dihadapi oleh para guru SMK di Kabupaten Pekalongan dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan luaran berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal, video kegiatan yang diunggah di kanal YouTube, serta artikel atau berita online yang diunggah di redaksi [metropolitanupdate.com](http://metropolitanupdate.com) dan [kompasiana.com](http://kompasiana.com).

Kegiatan bimbingan teknis ini dihadiri oleh 40 peserta, yakni guru-guru dan tenaga kependidikan dari sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Dimulai pada pukul 08.00 pagi, kegiatan diawali dengan presensi dan pengondisian peserta untuk masuk ke dalam ruangan. Agenda dilanjutkan dengan sambutan oleh pihak Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, serta

sambutan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**Gambar 2:** Sambutan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan

Dalam sambutannya, Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan menyambut tim pengabdian masyarakat dengan hangat dan mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya bahwa kegiatan bimbingan teknis ini memperluas wawasan para guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan.

Materi yang disampaikan berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, elemen pendidikan inklusif, serta komponen pendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Selain itu, disinggung pula mengenai kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah selayaknya dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam sesi pemaparan materi, disampaikan bahwa regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan ini membahas mengenai kesetaraan akses pendidikan, bahwa setiap warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan akses pendidikan, termasuk di



sekolah umum yang menerima dan melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus di semua jenjang. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif diperkuat dengan penyediaan akomodasi yang layak terhadap kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, mencakup kurikulum yang fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, lingkungan yang inklusif, serta fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, meliputi aksesibilitas fisik, alat bantu pembelajaran, dan teknologi adaptif yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus.



Gambar 3: Kegiatan Pemaparan Materi



Gambar 4: Peserta Menyimak Pemaparan Materi

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak, terutama pihak sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tantangan tersebut antara lain masih terjadi diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, terjadinya pemisahan pendidikan yang

ekstrem berdasarkan identitas tertentu, pembelajaran di sekolah masih monoton dan sekedar untuk menyelesaikan kurikulum, serta kurang diperhatikannya perbedaan dan keberagaman. Sementara itu, dijelaskan pula bahwa pendidikan inklusif diselenggarakan dengan berdasar kepada beberapa elemen, antara lain: a) mengakomodasi seluruh peserta didik; b) menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; c) menghargai perbedaan dan keberagaman; d) kurikulum, metode, media, dan lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; e) aksesibilitas fisik dan non fisik yang memadai; f) guru dan tenaga kependidikan bekerja dalam tim; dan g) keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan atau pembelajaran.

Untuk mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan komponen-komponen yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut; a) berubahnya cara pandang dari sistem pendidikan yang eksklusif menuju sistem pendidikan yang inklusif; b) tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mengajar atau mendidik peserta didik dengan keberagaman, terutama peserta didik berkebutuhan khusus; c) tersedianya aksesibilitas fisik dan non fisik yang menunjang kebutuhan akademik maupun non akademik peserta didik berkebutuhan khusus, seperti *guiding block*, media pembelajaran interaktif, toilet ramah disabilitas, teknologi adaptif, bidang miring untuk pengguna kursi roda, dan sebagainya; d) adanya keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah; e) adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik; f) tersedianya dukungan dari para pemangku kepentingan terkait regulasi, program kerja, dan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; g) adanya kemitraan dengan pihak terkait lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, maupun mitra individual; dan h) meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Penyampaian materi dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab.

Para guru dan tenaga kependidikan dengan bersemangat mengajukan pertanyaan mengenai berbagai kondisi, masalah, maupun tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pertanyaan yang diajukan ialah seputar cara menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif serta strategi dalam menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam sesi diskusi, para peserta yang dipandu oleh moderator dan narasumber berdiskusi mengenai cara menangani orang tua peserta didik yang masih belum mampu menerima kenyataan bahwa anaknya merupakan anak berkebutuhan khusus. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan salah satu peran penting dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif (Hanifah et al., 2021). Permasalahan di lapangan bahwa terdapat orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang belum mampu menerima kondisi anak mereka menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Elisabeth Kübler-Ross dalam buku yang berjudul “*On Death and Dying*”, mengungkapkan bahwa terdapat 5 tahap dalam menerima kenyataan, yaitu The Five Stages of Grief: a) penyangkalan (*denial*), yakni tahap penyangkalan terhadap apa yang menimpa seseorang, bahkan hingga orang tersebut berpura-pura bahwa semua baik-baik saja; b) depresi (*depression*), yaitu kondisi saat orang tersebut mulai menyadari kondisi yang dihadapinya, namun terlalu kalut hingga tidak mampu untuk mencari jalan keluar atas masalahnya; c) marah (*angry*), yaitu seseorang menjadi tidak bisa mengontrol emosinya, menjadi lebih sensitif, sehingga seringkali berperilaku yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain; d) tawar-menawar (*bargaining*), yakni tahap seseorang merasa berada di antara dua kondisi menolak atau menerima hal yang dialaminya; e) menerima dan memahami (*acceptance and adjustment*), yakni tahap penerimaan atas kenyataan yang dialami, bersyukur atas kondisinya, serta mulai berpikir positif untuk mencari jalan keluar yang berguna untuk menghadapi masalah tersebut (Wahyuni et al., 2022).

Bertolak dari teori tersebut, melalui proses diskusi, didapatkan beberapa solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Pertama, hal tersebut dapat ditangani dengan melakukan pendekatan secara perlahan kepada orang tua peserta didik, kemudian menyampaikan bahwa anak mereka mengalami kondisi sedemikian rupa, penyampaian dilakukan dengan bahasa yang santun dan bijak agar tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan. Solusi kedua adalah mengajak orang tua untuk menerima dan memahami bahwa anak mereka memiliki kebutuhan khusus yang semakin cepat diidentifikasi, maka akan semakin cepat anak mendapatkan penanganan yang tepat dan dapat mengejar ketertinggalan. Selain itu, guru dapat memberi pemahaman kepada orang tua agar mereka membantu anak untuk belajar di rumah.

Pada kegiatan *focus group discussion* (FGD), topik yang dibahas adalah tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya akses materiil terhadap proses asesmen peserta didik berkebutuhan khusus, serta pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus oleh guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.

Berkaitan dengan proses asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus, sekolah diharapkan untuk membimbing orang tua atau wali peserta didik dalam melakukan asesmen melalui tenaga ahli yang mendukung, yakni psikolog. Apabila pihak orang tua peserta didik terkendala oleh biaya, sekolah diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan fakultas psikologi untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Kemudian berkaitan dengan penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, guru hendaknya menerima terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, sehingga guru bisa memperkuat *bonding* dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di *setting* inklusif, guru harus mampu untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta didik berkebutuhan selama proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk semua peserta didik (Hanifah et al.,

2021). Setelah terjalin ikatan yang baik, guru melakukan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan dan potensi belajar peserta didik, untuk kemudian disusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal. Tujuan pembelajaran dapat disusun dengan menyesuaikan kondisi peserta

didik. Pembelajaran juga diharapkan agar dikembangkan sesuai konteks kehidupan agar peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, dapat menerapkan hal-hal yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat.

**Tabel 1** : Rekapitulasi Hasil Observasi Partisipasi Peserta

Aspek yang Diamati	Jumlah Peserta Skor Tinggi*	Persentase (%)	Keterangan
Antusiasme selama kegiatan	36 dari 40 peserta	90%	Mayoritas peserta memperhatikan, mencatat, dan aktif bertanya
Pemahaman terhadap materi	34 dari 40 peserta	85%	Peserta mampu merespons pertanyaan dan mengaitkan materi dengan konteks di sekolah
Keterlibatan dalam diskusi	35 dari 40 peserta	87,5%	Aktif menyumbang ide dalam diskusi, mengajukan pertanyaan

\*Skor tinggi merujuk pada penilaian 3 atau 4 dari skala 1-4 dalam lembar observasi

Hasil observasi non-partisipatif selama kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi peserta tergolong tinggi dalam seluruh aspek yang diamati. Sebanyak 90% peserta menunjukkan antusiasme yang kuat, ditandai dengan perhatian penuh, pencatatan aktif, serta keberanian bertanya selama sesi berlangsung. Dalam hal pemahaman materi, 85% peserta mampu merespons pertanyaan fasilitator dengan baik dan mengaitkan isi materi dengan situasi nyata di sekolah masing-masing. Selain itu, keterlibatan peserta dalam diskusi juga tinggi, dengan 87,5% peserta secara aktif menyampaikan pendapat dan bertanya. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis tidak hanya berhasil menarik perhatian peserta, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman yang mendalam terhadap isu pembelajaran inklusif di SMK.

Antusias peserta bimbingan teknis ini sangat terlihat, terbukti pada saat penyampaian materi, para peserta menyimak penjelasan narasumber dengan khidmat. Kemudian pada sesi tanya jawab dan diskusi terpimpin, peserta dengan aktif mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan *focus group discussion* (FGD) membantu para peserta bimbingan teknis dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, seperti cara menghadapi

orang tua peserta didik yang tidak menerima bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, strategi dalam menangani dan merancang pembelajaran yang tepat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan berbagai kendala yang dihadapi oleh para guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Dengan diadakannya kegiatan bimbingan teknis ini, terjalin kemitraan antara Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Secara khusus, kegiatan ini memberikan pengaruh positif terhadap guru-guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pekalongan berhasil memperluas pengetahuan maupun wawasan para guru dan tenaga kependidikan mengenai pendidikan inklusif, terutama hal-hal yang berkaitan dengan menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Melalui pemaparan materi dan *focus group discussion* (FGD), para peserta mendapatkan pemahaman mengenai regulasi, tantangan,



serta berbagai komponen penting untuk meraih penyelenggaraan pendidikan inklusif yang optimal, serta solusi atas masalah yang terjadi. Kegiatan yang melibatkan 40 peserta dari berbagai jenjang sekolah ini menjadi wadah bagi para peserta dalam melakukan diskusi dan tanya jawab yang berfokus pada strategi pembelajaran dan kolaborasi dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mempererat kemitraan antara Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para guru dan tenaga kependidikan yang terlibat, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa luaran penting, yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, video dokumentasi yang diunggah di kanal YouTube, serta artikel berita yang dipublikasikan di portal berita online, dengan tujuan untuk memperluas jangkauan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dengan harapan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menghadapi tantangan di lapangan secara efektif.

Untuk menindaklanjuti kesuksesan kegiatan bimbingan teknis ini, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

- a. Pengembangan program berkelanjutan, sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan baru dalam pendidikan inklusif.
- b. Kolaborasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan, sebagai tindak lanjut dari kemitraan yang telah terjalin antara Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, tidak hanya melalui kegiatan bimbingan teknis ini, tetapi juga melalui penelitian dan

pengembangan modul pendidikan inklusif yang lebih komprehensif.

- c. Evaluasi berkelanjutan, yakni dilakukan pasca-program untuk mengukur dampak kegiatan pada peningkatan keterampilan guru dan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, sebagai acuan untuk perbaikan kegiatan di masa depan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan yang mewakili pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan, serta pihak-pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfikri, F., Kebijakan Pendidikan Inklusi, A., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2).
- Buchner, T., Shevlin, M., Donovan, M., Gercke, M., Goll, H., Šiška, J., Janyšková, K., Smogorzewska, J., Szumski, G., Vlachou, A., Demo, H., Feyerer, E., & Corby, D. (2021). Same Progress for All? Inclusive Education, the United Nations Convention on the Rights of Persons With Disabilities and Students With Intellectual Disability in European Countries. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18(1), 7–22. <https://doi.org/10.1111/jppi.12368>
- Eldh, A. C., Rycroft-Malone, J., van der Zijpp, T., McMullan, C., & Hawkes, C. (2020). Using Nonparticipant Observation as a Method to Understand Implementation Context in

- Evidence-Based Practice. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 17(3), 185–192. <https://doi.org/10.1111/wvn.12449>
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2021). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Menjalani Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473483.
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 5(2), 90. <https://doi.org/10.17977/um031v5i22019p90-95>
- Kusmaryono, I. (2023). Faktor berpengaruh, tantangan, dan kebutuhan guru di sekolah inklusi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.30659/pendas.10.1.12-23>
- Marbun, M. E., & Prastawa, S. (2023). Implementasi Industri Kreatif pada Pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Surakarta. *Education Journal: General and Specific Research*, 3(2), 542–551.
- Nara, H., Purnamawati, S. N., Firdausy, R., Sajidah, H., Jasmine, J., & Nugraha, H. A. (2023). PENDAMPINGAN ORANG TUA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) JATINEGARA KAUM JAKARTA TIMUR. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 128. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.42591>
- Rahayu, P., Majid, A., & Salehudin, M. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; dalam Perencanaan Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(2), 54–63. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i2.343>
- Ramadhana, B., & Meitasari, I. (2023). Kajian Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 8(2), 38–45. <https://doi.org/10.36709/jppg.v8i2.1>
- Rurit, Bernada., & Dewanto, Nugroho. (2021). *Indonesia menuju 2045: SDM unggul dan teknologi adalah kunci*. Penerbit Buku Kompas.
- Socorro, J. J. S., & Reyes, O. G. (2020). Inclusive Education: Its Legal Component from International Organizations and National Public Policy. *MENDIVE*, 18(1), 134–154.
- TÜMEN AKYILDIZ, S., & AHMED, K. H. (2021). An Overview of Qualitative Research and Focus Group Discussion. *International Journal of Academic Research in Education*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.17985/ijare.866762>
- Tyas Pratiwi, L., Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Nur Marcela, I., & Faza Afifah, A. (2022). PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314–318. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i2.704>
- Wahyuni, S., Jumilah, B. S., Mariani, Y. K., & Sabambam, M. N. (2022). Model-Model Penerimaan Orang Tua dari Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 170–186. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.51884>